

Gerakan Global Pembebasan Palestina Pasca 'Boikot-Divestasi-Sanksi': Refleksi Kritis dan Alternatif

Virtuous Setyaka¹, Zahidiyah Ela Tursina², Dwi Ardiyanti³

¹Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

²Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

³Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora, Universitas Darussalaam Gontor

e-mail : virtuoussetyaka@soc.unand.ac.id

Abstract

The Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement emerged as a response to Israel's settler colonialism, apartheid, and human rights violations against the Palestinian people. While BDS has succeeded in raising global awareness and fostering international solidarity, its effectiveness in achieving structural change remains contested. This article offers a critical reflection on the achievements and limitations of the BDS movement within the context of the global political economy, and proposes an alternative strategy grounded in Coxian critical theory. Emphasizing the role of social forces of production, state formation, and world order, this approach promotes more inclusive and transformational transnational mobilization. It also involves reforming global institutions, building alliances among Global South countries, and leveraging media and technology to construct counter-hegemonic narratives that challenge Israel's ideological and economic dominance. The article argues that the liberation of Palestine requires a global movement that goes beyond economic tactics, toward a reconstruction of global structures rooted in social justice.

Keywords: *BDS, critical reflection, Coxian perspective, alternative global movement, Palestine*

Abstrak

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) muncul sebagai respons terhadap praktik kolonialisme pemukim, apartheid, dan pelanggaran HAM oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Meskipun BDS berhasil meningkatkan kesadaran global dan menggugah solidaritas internasional, efektivitasnya dalam mendorong perubahan struktural masih diperdebatkan. Artikel ini menawarkan refleksi kritis atas keberhasilan dan keterbatasan gerakan BDS dalam konteks politik ekonomi global, serta mengusulkan strategi alternatif berbasis teori kritis Coxian. Dengan menekankan peran kekuatan sosial dari produksi, formasi negara, dan tatanan dunia, pendekatan ini mendorong mobilisasi lintas batas yang lebih inklusif dan transformasional. Selain itu, strategi ini juga melibatkan reformasi institusi global, aliansi negara-negara Global South, serta pemanfaatan media dan teknologi untuk menciptakan narasi kontra-hegemoni terhadap dominasi ideologis dan ekonomi Israel. Artikel ini menegaskan bahwa pembebasan Palestina memerlukan gerakan global yang melampaui taktik ekonomi semata, menuju rekonstruksi struktur global yang lebih adil dan berlandaskan keadilan sosial.

Kata kunci: BDS, gerakan global alternatif, Palestina, perspektif Coxian, refleksi kritis

Pendahuluan

Sejak dimulainya pendudukan Israel yang penuh kekerasan di Palestina pada tahun 1948 melalui pembersihan etnis terhadap lebih dari setengah penduduk asli Palestina, Israel terus berusaha menguasai sebanyak mungkin tanah dan menggusur sebanyak mungkin warga Palestina dari tanah mereka. Dalam situs web bdsmovement.net disebutkan bahwa sejak 1948, Israel telah menolak hak-hak dasar warga Palestina dan mengabaikan kewajiban untuk mematuhi hukum internasional. Israel mempertahankan rezim kolonialisme pemukim, apartheid, dan pendudukan terhadap rakyat Palestina. Akibat dari pengusiran paksa yang sistematis itu, saat ini terdapat pengungsi Palestina. UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) mencatat lebih dari 5,9 juta pengungsi Palestina yang terdaftar (UNRWA, 2023). Namun, total pengungsi Palestina di seluruh dunia, termasuk yang tidak terdaftar di UNRWA, diperkirakan melebihi 7 juta (BADIL Resource Center, 2020). Bahkan menurut IMEU (2024), jumlahnya lebih besar lagi. Mereka ditolak haknya untuk kembali ke rumah mereka hanya karena mereka bukan Yahudi, padahal Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 194 (1948) menjamin hak kembali bagi pengungsi Palestina (United Nations General Assembly Resolution 194 (III), 1948).

Human Rights Watch mencatat bahwa diskriminasi sistemik berdasarkan etnis atau identitas non-Yahudi merupakan pelanggaran hukum internasional (Human Rights Watch, 2021).

Hukum internasional mengakui Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan Suriah, sebagai wilayah yang diduduki oleh Israel. PBB dan Mahkamah Internasional (ICJ) secara konsisten menyebut wilayah-wilayah tersebut sebagai wilayah pendudukan (ICJ, 2004). Sebagai bagian dari pendudukan militernya, Israel mencuri tanah dan memaksa orang Palestina masuk ke dalam ghetto yang dikelilingi oleh pos pemeriksaan, pemukiman, menara pengawas, dan tembok apartheid yang ilegal.

Keberhasilan Gerakan BDS Global

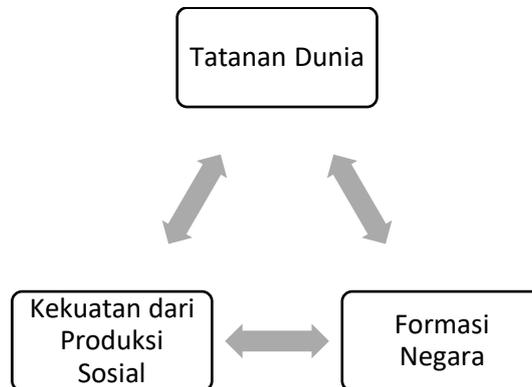
Keberhasilan	Penjelasan
Peningkatan Kesadaran Global	Gerakan BDS berhasil meningkatkan kesadaran internasional tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina, terutama terkait dengan kebijakan apartheid.
Penurunan Permintaan Produk Israel	Kampanye boikot BDS berdampak pada penurunan permintaan terhadap produk-produk buatan Israel serta produk dari perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel.
Divestasi oleh Perusahaan Multinasional	Beberapa perusahaan besar, seperti Veolia dan Caterpillar, mengalami penurunan pendapatan dan divestasi dari investor internasional akibat tekanan dari kampanye BDS.
Isolasi Israel di Panggung Internasional	BDS berperan dalam memperburuk posisi Israel di panggung internasional, dengan meningkatnya tekanan dari negara-negara dan organisasi internasional untuk menghentikan kebijakan Israel.
Dukungan terhadap Palestina	BDS berhasil menggugah solidaritas internasional, dengan banyak negara, organisasi, dan individu yang menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui aksi boikot dan sanksi.
Pengaruh terhadap Perusahaan Keuangan	Beberapa lembaga keuangan internasional, seperti HSBC dan Vanguard, dikritik dan mengalami tekanan untuk menarik investasi mereka dari perusahaan yang terlibat dalam pemukiman ilegal.
Penerimaan oleh Negara-negara	Beberapa negara bagian di AS, serta negara-negara Eropa, memberlakukan larangan atau pembatasan terhadap bisnis yang mendukung BDS, memperlihatkan pengaruhnya dalam kebijakan internasional.
Peningkatan Gerakan Solidaritas Global	BDS berhasil memperkuat gerakan solidaritas global yang lebih luas dengan menghubungkan berbagai organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan kelompok pembela HAM di seluruh dunia.

Meskipun berhasil meningkatkan kesadaran global, ada sejumlah kritikan terhadap BDS yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini. Artikel ini bertujuan untuk melakukan refleksi kritis terhadap peran BDS dalam perjuangan pembebasan Palestina, mengevaluasi kekuatan dan keterbatasannya, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks geopolitik global saat ini. Selain itu, artikel ini juga mengajukan alternatif strategi untuk memperkuat gerakan global yang lebih inklusif, berbasis pada analisis politik ekonomi kritis, khususnya dari perspektif Coxian atau pemikiran Robert W. Cox. Dengan menganalisis peran kekuatan sosial dalam produksi, formasi negara, dan tatanan dunia, artikel ini mengusulkan strategi baru yang dapat mempengaruhi perubahan politik global yang lebih substansial dan berkelanjutan (Cox, 1987). Artikel ini mengajukan tesis bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang melampaui boikot, divestasi, dan sanksi, dan mencakup transformasi sistem ekonomi global berdasarkan perspektif kritis Coxian. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan perspektif baru dengan fokus pada kekuatan sosial dari produksi, formasi negara, dan tatanan dunia global untuk memperkuat solidaritas internasional dan mendorong perubahan struktural yang lebih luas.

Teori Kritis Coxian

Dalam karyanya yang terkenal, *Production, Power, and World Order: Social Forces in the Making of History*, Cox mengembangkan konsep mengenai "social forces of production" dan hubungannya dengan dinamika global. Teori ini tidak hanya berfokus pada ekonomi sebagai alat pemahaman struktur kekuasaan, tetapi juga bagaimana aktor sosial—baik negara, perusahaan, maupun kelompok masyarakat—berperan dalam membentuk tatanan dunia. Elemen-elemen teori utama dalam kerangka Cox meliputi: pertama, *social forces of production*, menganalisis hubungan antara kekuatan ekonomi (tenaga kerja, modal, dan teknologi) dan struktur sosial yang mendukungnya. Kedua, formasi negara, memahami peran negara dalam mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan global. Ketiga, tatanan dunia, menyelidiki struktur sistem internasional dan hubungan antara negara, perusahaan multinasional, dan gerakan sosial. Lensa teoretis ini membantu menjelaskan mengapa gerakan seperti BDS, meskipun memiliki kekuatan, tetap dibatasi oleh struktur kapitalis, imperialis, dan neoliberalis global yang lebih luas. Selain itu, ini memberikan jalur untuk mengembangkan strategi alternatif yang dapat mengubah sistem dan struktur sosial yang mendukung ketidakadilan global.

Gambar 1
Analisis Struktur Global Coxian



Dalam pemikiran Cox, "social forces of production" merujuk pada hubungan antara kekuatan ekonomi (seperti teknologi, tenaga kerja, dan modal) dengan struktur sosial yang mendukungnya. Ia berpendapat bahwa pola-pola produksi yang dominan dalam suatu masyarakat sangat mempengaruhi struktur kekuasaan global dan hubungan internasional. Sebagai contoh, sistem kapitalisme global yang telah mendominasi sejak abad ke-19, melalui proses industrialisasi dan globalisasi, menghasilkan dominasi aktor-aktor utama (terutama negara-negara maju) dalam menetapkan aturan yang mengatur perdagangan, investasi, dan bahkan HAM di seluruh dunia. Menurut Cox, perubahan dalam "forces of production" (misalnya, kemajuan teknologi atau perubahan dalam sistem ekonomi global) akan mempengaruhi tatanan dunia dan mengubah struktur ekonomi yang ada. Ini berarti bahwa dinamika dalam ekonomi global—seperti pengaruh korporasi multinasional atau kebijakan perdagangan internasional—harus dianalisis dalam kerangka kekuatan sosial dan politik yang lebih luas, bukan hanya dilihat sebagai fenomena ekonomi semata.

Cox berargumen bahwa aktor sosial yang meliputi negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, memainkan peran krusial dalam mempengaruhi tatanan dunia yang ada. Dalam pandangannya, negara-negara bukan hanya agen yang bertindak dalam sistem internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi di dalam negara mereka sendiri, serta oleh tekanan eksternal yang datang dari aktor-aktor global lainnya. Sebagai contoh, negara-negara dengan kemampuan produksi yang lebih tinggi dan akses ke teknologi canggih cenderung mendominasi pengaturan struktur perdagangan internasional dan institusi keuangan global, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Hal ini menghasilkan hubungan yang tidak setara

antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, yang sering kali dipengaruhi oleh kebijakan yang lebih menguntungkan negara-negara besar dan perusahaan multinasional.

Dalam analisisnya terhadap dinamika global, Cox mengidentifikasi tiga bentuk utama tatanan dunia yang berkembang berdasarkan “social forces of production” yang ada pada masanya: tatanan dunia liberal, tatanan dunia sosial-demokratis, dan tatanan dunia sosialisme negara. Ketiga tatanan ini menggambarkan perubahan dalam cara kekuasaan ekonomi dan politik dikelola, serta bagaimana struktur kekuasaan ini terus berkembang seiring dengan perubahan dalam teknologi dan hubungan internasional. Cox juga menekankan bahwa dinamika global tidak hanya dipengaruhi oleh negara, tetapi juga oleh gerakan sosial dan aktor non-negara, seperti kelompok lingkungan atau gerakan HAM, yang memengaruhi cara negara-negara bertindak di tingkat internasional. Oleh karena itu, pemikiran Cox menawarkan analisis yang lebih holistik terhadap struktur internasional, dengan mengintegrasikan berbagai kekuatan sosial dan politik yang membentuk tatanan dunia yang terus berkembang.

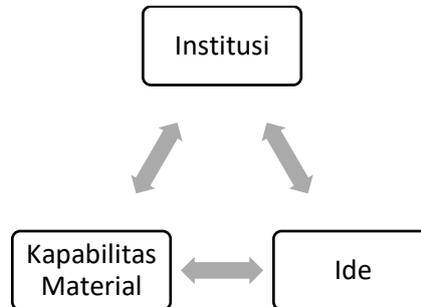
Pemikiran Cox mengenai “social forces of production” dan tatanan dunia sangat relevan untuk analisis hubungan internasional di dunia kontemporer. Dalam konteks globalisasi saat ini, perubahan dalam teknologi dan produksi telah mengubah dinamika kekuasaan internasional. Misalnya, dengan meningkatnya digitalisasi dan ekonomi berbasis data, negara-negara dan perusahaan besar semakin mendominasi ekonomi global, memengaruhi kebijakan perdagangan internasional, dan menantang konsep tradisional mengenai kedaulatan negara. Selain itu, perubahan dalam hubungan internasional juga dapat dilihat melalui munculnya aktor-aktor non-negara, seperti organisasi internasional, INGOs, dan gerakan sosial, yang memiliki pengaruh besar dalam mengatur kebijakan global terkait dengan keberlanjutan, perubahan iklim, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa “social forces of production” tetap relevan untuk menganalisis cara-cara di mana tatanan dunia terus berkembang.

Dalam perspektif teori kritis Coxian, untuk menghasilkan kekuatan dari produksi sosial, memformat negara-negara yang ada, dan merestrukturisasi tatanan dunia, tiga aspek potensi kekuatan dari hegemoni dan kontra-hegemoni sangat penting, yaitu kapabilitas material, ide, dan institusi. Kapabilitas material mengacu pada sumber daya fisik dan ekonomi yang dimiliki oleh negara atau aktor sosial. Ini termasuk kekuatan militer, kekayaan ekonomi, kontrol atas sumber daya alam, dan kapasitas teknologi. Dalam hegemoni, negara atau aktor yang dominan menggunakan kapabilitas material untuk memperkuat posisi mereka dalam tatanan dunia. Di sisi lain, dalam kontra-hegemoni, aktor yang lebih lemah dapat menggunakan kapabilitas material mereka, meskipun terbatas, untuk mengganggu atau menentang dominasi tersebut, misalnya

melalui aliansi atau penggunaan sumber daya secara efektif untuk mengguncang struktur yang ada.

Gambar 2

Potensi Kekuatan Perubahan dalam Perspektif Coxian



Dalam konteks gerakan BDS, kapabilitas material merujuk pada sumber daya yang dimiliki oleh aktor-aktor utama dalam konflik ini, termasuk negara-negara, perusahaan, dan organisasi internasional. Dalam hal ini, Israel sebagai negara hegemoni di wilayah tersebut memiliki kapabilitas material yang sangat besar, termasuk militer, ekonomi, dan dukungan politik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Sementara itu, gerakan BDS berusaha mengakses kapabilitas material mereka sendiri, meskipun terbatas, untuk mempengaruhi sektor ekonomi global (misalnya, dengan mendesak perusahaan multinasional untuk menarik investasi dari Israel). Dalam perspektif kontra-hegemoni, gerakan BDS mencoba memanfaatkan kapabilitas material dari negara-negara yang mendukung Palestina, serta aktor sosial dan individu untuk mendukung boikot terhadap produk-produk Israel dan menekan kebijakan pemerintah Israel. Namun, tantangannya adalah bagaimana gerakan ini bisa lebih efektif dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk melawan hegemoninya Israel, khususnya dalam konteks dominasi ekonomi dan politik global.

Ide mengacu pada norma, nilai, dan wacana yang membentuk pemahaman tentang dunia, yang seringkali berasal dari kekuatan budaya, pendidikan, dan media. Dalam teori Coxian, ide adalah kunci dalam pembentukan dan pemeliharaan hegemoni. Dalam hegemoni, ide-ide yang dominan—misalnya, ide kapitalisme, neoliberalisme, atau demokrasi liberal—diperkenalkan dan disebar untuk mempertahankan dominasi. Sebaliknya, kontra-hegemoni berusaha untuk menggugat ide-ide ini dengan

alternatif pemikiran dan praktek, misalnya melalui gerakan sosial, ideologi alternatif, atau pembentukan wacana yang mengarah pada perubahan sosial dan politik.

Evaluasi terhadap Gerakan BDS

Gerakan BDS berhasil meningkatkan kesadaran global tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel, mendesak beberapa perusahaan internasional untuk menarik investasi mereka dari Israel, serta mendorong negara-negara untuk mempertimbangkan sanksi terhadap negara tersebut. BDS juga berhasil menggugah gerakan solidaritas global yang menggabungkan berbagai kelompok masyarakat sipil dan individu yang berkomitmen pada pembebasan Palestina (Bennis, 2012).

Namun, gerakan ini tidak terlepas dari kritik, baik dari pihak pro-Israel maupun dari kalangan yang mendukung pembebasan Palestina, tetapi menganggap BDS tidak cukup efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Peneliti dan aktivis seperti Bennis (2012) berargumen bahwa BDS mungkin mengabaikan pentingnya saluran diplomatik dan perundingan multilateral dalam mencari solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi Palestina. Kritik lain menyebutkan bahwa pendekatan yang berfokus pada boikot dan divestasi dapat memperburuk polarisasi politik antara Israel dan Palestina, serta memicu ketegangan di dalam masyarakat internasional yang lebih luas. Meskipun niatannya adalah untuk melawan kolonialisme yang dilakukan oleh Israel, pendekatan ini justru dapat memperburuk interaksi sosial di kalangan masyarakat internasional. Sebagai contoh, interaksi sosial di kalangan bisnis internasional menjadi semakin buruk, yang pada gilirannya turut memengaruhi kondisi ekonomi secara negatif.

Gerakan BDS melakukan evaluasi diri, seperti yang tercermin dalam laporan berjudul *Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign, Towards a Global Movement: A Framework for Today's Anti-apartheid Activism* (2007). Laporan tersebut menyatakan bahwa membangun dan memperkuat gerakan BDS global menjadi fokus utama dalam upaya solidaritas untuk Palestina. Laporan ini meninjau kondisi gerakan BDS dalam konteks kerja solidaritas global, sambil menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Koordinasi, kohesi, dan kejelasan di antara berbagai kampanye lokal dan nasional dipandang sebagai hal yang penting untuk memperkuat gerakan. Dengan belajar dari strategi BDS sebelumnya dan kampanye anti-apartheid di Afrika Selatan, laporan ini mengidentifikasi peluang bagi aktivisme global untuk mendukung perjuangan Palestina. Ditujukan kepada gerakan solidaritas, organisasi keadilan sosial,

dan serikat pekerja, laporan ini menguatkan Seruan Palestina (2005) untuk kebebasan dan keadilan melalui BDS.

Sebagian pihak menganggap bahwa gerakan ini terlalu fokus pada aspek ekonomi dan kurang memberi perhatian pada aspek politik serta diplomatik yang lebih strategis. Peneliti dan aktivis seperti Bennis (2012) berpendapat bahwa BDS mungkin mengabaikan pentingnya saluran diplomatik dan perundingan multilateral dalam mencari solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi Palestina. Kritik lain menyatakan bahwa pendekatan yang berfokus pada boikot dan divestasi dapat memperburuk polarisasi politik antara Israel dan Palestina, serta memicu ketegangan di masyarakat internasional yang lebih luas.

Meskipun telah memperoleh dukungan signifikan, BDS menghadapi hambatan besar dalam mempengaruhi kebijakan negara besar seperti Amerika Serikat (AS), yang terus memberikan dukungan diplomatik dan ekonomi kepada Israel. Beberapa negara yang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Israel juga tidak menunjukkan minat untuk memberlakukan sanksi. Selain itu, tekanan politik dan hukum terhadap aktivis dan organisasi yang mendukung BDS, seperti yang terjadi di Eropa dan AS, juga membatasi ruang gerak gerakan ini (Finkelstein, 2016; Pappé, 2017).

BDS berhasil, meskipun terbatas, dalam mempengaruhi kebijakan Israel, terutama dalam mengubah sikap pemerintah dan masyarakat internasional terhadap Israel. Meskipun BDS mendapatkan dukungan luas di kalangan masyarakat sipil, terutama di Eropa dan Amerika Utara, dampak ekonomi terhadap Israel belum terbukti cukup signifikan untuk menghentikan kebijakan dan perilaku Israel yang melanggar hak asasi manusia (Pappé, 2017; Chomsky, 2015). Banyak negara, terutama yang memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Israel, tetap enggan melaksanakan sanksi atau memboikot produk-produk Israel.

Kritik Coxian terhadap BDS

Kritik teori kritis terhadap BDS berfokus pada pemahaman bahwa BDS hanya merupakan respons terhadap sistem ekonomi global yang lebih besar dan tidak cukup menawarkan transformasi struktural yang diperlukan dalam tatanan global (Cox, 1987). Gerakan BDS dipandang sebagai strategi jangka pendek yang kurang memperhitungkan dinamika sistemik dalam politik internasional dan ekonomi global yang lebih luas. Murphy (2005) dan Gills (2011) menyarankan bahwa untuk menciptakan perubahan yang lebih mendalam, dibutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi, melibatkan reformasi dalam tatanan ekonomi global serta tatanan sosial-politik dunia. Reformasi

tatanan ekonomi-politik global ini merupakan langkah besar, karena perubahan tersebut akan mengarah pada sistem dan kebijakan yang kelak akan dipatuhi dan diterapkan di masyarakat internasional. Reformasi tatanan ekonomi-politik global ini adalah sebuah perjuangan di tingkat konstitusi. Oleh karena itu, ini akan menjadi perjuangan yang saling memperkuat, yakni gabungan antara perjuangan solidaritas sosial dan perjuangan di tingkat konstitusi.

Bennis (2012) mencatat kritik dari beberapa kalangan bahwa BDS hanya berfokus pada strategi ekonomi dan mengabaikan upaya diplomatik yang lebih luas, yang berpotensi memperburuk polarisasi konflik. Chomsky (2015) dan Pappé (2017) memberikan analisis tajam mengenai kegagalan besar BDS dalam mendesak perubahan kebijakan Israel, meskipun gerakan ini mendapatkan dukungan luas. Gordon (2016) mengkritik gerakan BDS atas eksklusivitasnya, yang terkadang menutup ruang bagi pendekatan yang lebih inklusif terhadap konflik. Menggunakan pemikiran Cox (1987) dan Murphy (2005), BDS dipandang dari perspektif kritik terhadap sistem ekonomi global, yang mencatat bahwa meskipun BDS penting, gerakan ini hanya berfungsi sebagai respons terhadap struktur yang lebih besar dan tidak cukup memberikan solusi transformasional untuk masalah Palestina.

BDS memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan visibilitas masalah Palestina di panggung internasional, namun terbukti tidak cukup efektif dalam memaksa perubahan kebijakan Israel. Menghadapi tantangan ini, strategi alternatif yang mengadopsi pendekatan politik ekonomi kritis dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk perubahan struktural dalam sistem internasional. Dengan merombak tatanan dunia yang mendukung ketidaksetaraan dan kolonialisme, serta meningkatkan kesadaran global melalui media dan teknologi, gerakan ini memiliki potensi untuk lebih mengakar dan mencapai hasil yang lebih substansial dalam perjuangan pembebasan Palestina.

Salah satu kekuatan besar yang digunakan oleh Israel dan sekutunya adalah kontrol atas wacana ideologi, seperti memposisikan Israel sebagai pelindung terhadap terorisme dan sebagai negara yang sah di dunia internasional. Ini adalah bentuk dari hegemoni ideologi yang mengakar dalam politik global. BDS berusaha untuk menggugah wacana internasional melalui ide alternatif yang menantang narasi dominan tentang legitimasi Israel. Sebagai bagian dari kontra-hegemoni, BDS menekankan bahwa masalah Palestina adalah masalah hak asasi manusia dan keadilan sosial. Di sisi lain, kritik terhadap BDS sendiri—seperti tuduhan anti-Semitisme yang sering dilontarkan oleh lawan—dapat dilihat sebagai bentuk serangan ideologis untuk mempertahankan hegemoni Israel dan menghalangi wacana alternatif tentang keadilan Palestina. Untuk memperkuat gerakan BDS pasca keberhasilan awalnya, gerakan ini harus menciptakan

dan memperkuat narasi alternatif yang lebih inklusif, mencakup solidaritas global yang lebih luas dan membangun ide-ide yang bisa menggantikan wacana yang mendukung hegemoninya Israel.

Institusi mencakup struktur dan mekanisme yang mengatur interaksi sosial dan politik, seperti negara, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. Dalam konteks Coxian, institusi memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan tatanan dunia. Hegemoni seringkali diperkuat oleh institusi yang mendukungnya, seperti IMF, Bank Dunia, atau PBB, yang menetapkan aturan-aturan global yang menguntungkan negara-negara dominan. Sementara itu, kontra-hegemoni berupaya untuk menggoyahkan atau mengganti institusi-institusi ini dengan struktur yang lebih inklusif atau adil yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi negara-negara atau kelompok yang terpinggirkan.

Institusi-institusi internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia sering dipandang sebagai alat untuk memelihara status quo hegemoni global yang didominasi oleh kekuatan besar. Dalam hal ini, Israel mendapatkan dukungan dari berbagai institusi internasional yang memperkuat legitimasi dan posisi politiknya di dunia internasional, meskipun seringkali melanggar hak-hak Palestina. Gerakan BDS pasca-era awal dapat mendorong pembentukan institusi alternatif yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini bisa mencakup penguatan kerjasama antara negara-negara Global South, membentuk aliansi yang lebih kuat antara masyarakat sipil internasional, dan memperkuat penggunaan mekanisme diplomatik atau ekonomi untuk melawan kebijakan-kebijakan yang merugikan Palestina.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang kapabilitas material, ide, dan institusi memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana kekuatan sosial dapat dikelola dalam rangka menghasilkan perubahan sosial dan politik dalam kerangka teori Coxian. Ketiga aspek ini saling terkait dan penting dalam mempengaruhi tatanan dunia, baik melalui mekanisme hegemoni yang mendominasi maupun kontra-hegemoni yang berusaha untuk merombak struktur yang ada. Salah satu kekuatan utama yang dimiliki oleh gerakan BDS adalah potensi solidaritas global. Teori Coxian menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menciptakan perubahan dalam tatanan dunia.

Dalam konteks BDS, solidaritas ini dapat dipengaruhi oleh jaringan global dari masyarakat sipil, akademisi, aktivis, dan organisasi internasional yang mendukung pembebasan Palestina. Untuk melanjutkan momentum BDS, perlu ada peningkatan dalam mobilisasi sosial di tingkat grassroots yang melibatkan aktor-aktor sosial di berbagai belahan dunia, termasuk generasi muda yang lebih terhubung dengan jaringan

sosial media dan komunikasi digital. Ini adalah bentuk dari kontra-hegemoni yang dapat mengganggu dan merombak tatanan dunia yang mendukung dominasi Israel.

Pendekatan Alternatif terhadap Strategi BDS

Dengan menggunakan analisis Coxian, pendekatan alternatif terhadap strategi BDS adalah mendorong hal-hal berikut: **pertama**, mobilisasi kekuatan sosial, memperkuat kekuatan sosial dari buruh, intelektual, dan gerakan sosial untuk mengorganisasi proses produksi kolektif transnasional yang menantang struktur kapitalis dan imperialis. Ini melibatkan penciptaan mobilisasi politik yang lebih inklusif dan berbasis dari bawah lintas negara. **Kedua**, reformasi institusi negara, mendorong reformasi institusi internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk mengurangi bias terhadap negara maju dan mendistribusikan kembali kekuatan global, sehingga negara-negara berkembang memiliki suara lebih besar dalam pengambilan keputusan ekonomi global.

Ketiga, membangun solidaritas antarnegara berkembang. Menggunakan platform seperti BRICS untuk memperkuat solidaritas internasional antar negara berkembang, menantang dominasi kekuatan Barat, dan mempromosikan struktur ekonomi global yang lebih adil. Keempat, media dan teknologi global dengan memanfaatkan media dan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap pembebasan Palestina serta melawan narasi pro-Israel dalam media global dan wacana politik internasional.

Pendekatan ini mendorong gerakan BDS untuk berkembang melampaui keterbatasannya saat ini. Gerakan BDS ke depan seharusnya dilakukan dengan berfokus pada perubahan struktural daripada taktik jangka pendek yang bersifat transaksional. Melalui mobilisasi gerakan sosial global, reformasi kekuasaan negara, dan memperkuat solidaritas internasional, artikel ini berpendapat bahwa tatanan dunia baru yang lebih adil dapat terwujud, yang mendukung pembebasan Palestina dan perdamaian global.

Dari perspektif Coxian, bentuk resistensi yang lebih terbatas harus mempertimbangkan secara mendalam bagaimana struktur sosial dan kekuatan ekonomi global turut membentuk politik internasional yang lebih luas (Cox, 1987; Gill, 1995). Meskipun resistensi terbatas ini berhasil menggalang dukungan internasional, ia masih terjebak dalam dinamika kapitalisme global yang didorong oleh kepentingan negara-negara besar dan perusahaan multinasional yang memiliki hubungan erat. Menurut Cox, kekuatan sosial yang mencakup aktor-aktor seperti buruh, kaum intelektual, dan gerakan sosial perlu dimobilisasi secara lebih efektif untuk meruntuhkan struktur

kapitalisme global yang mendukung imperialisme dan kolonialisme (Cox, 1987). Gerakan global harus mampu mengartikulasikan perjuangannya dalam kerangka yang lebih luas, dengan mendesak perubahan terhadap struktur ekonomi dan sosial global yang mendasari kebijakan negara-negara besar dan kapitalisme global.

Perspektif Coxian mengusulkan sebuah alternatif gerakan global yang lebih terintegrasi dalam tatanan dunia yang lebih luas. Alternatif ini mencakup strategi politik ekonomi yang bertujuan untuk mengubah tatanan ekonomi global yang mendukung ketidaksetaraan dan imperialisme. Perubahan sosial global tidak akan tercapai hanya melalui strategi ekonomi seperti boikot dan divestasi, melainkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif yang menggabungkan kekuatan sosial dari produksi, formasi negara, dan tatanan dunia yang lebih adil.

Strategi Gerakan Global Pembebasan Palestina Kedepan

Pendekatan PEK Coxian menekankan pentingnya menganalisis tatanan dunia kapitalis dan peran kekuatan sosial dalam produksi serta formasi negara. Solidaritas internasional dicapai dengan merombak struktur global yang mendukung ketidaksetaraan dan penjajahan, serta memanfaatkan instrumen ekonomi untuk mengubah pola distribusi sumber daya secara global (Cox, 1987; Harvey, 2005). Penggunaan teknologi dapat memperkuat narasi gerakan, melibatkan lebih banyak individu dan kelompok, serta membentuk solidaritas ideologis dan kultural yang lebih kuat di seluruh dunia (Fuchs, 2017).

Negara-negara yang mendukung Palestina turut mendukung BDS, baik melalui tindakan diplomatik langsung maupun dengan memberikan tekanan terhadap perusahaan dan organisasi internasional yang memiliki hubungan dengan Israel. Misalnya, beberapa negara Eropa—meskipun tidak secara resmi mendukung gerakan BDS—telah menekan perusahaan-perusahaan besar untuk menarik investasi mereka dari Israel terkait dengan pemukiman ilegal di Tepi Barat dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Pada tahun 2019, Prancis dan Inggris menekan perusahaan seperti Veolia untuk menghentikan proyek-proyek terkait pemukiman ilegal Israel. Ini menunjukkan bahwa tekanan diplomatik dan ekonomi dapat memengaruhi kebijakan negara terkait Israel (European Union, 2019).

Namun, beberapa negara besar, terutama AS, dengan tegas menentang gerakan BDS. Mereka menganggap BDS sebagai tindakan anti-Semitisme atau serangan terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri. Pada tahun 2020, Presiden AS Donald Trump bahkan menandatangani *Executive Order* yang menyatakan bahwa BDS bertentangan

dengan kebebasan berbicara dan menyerukan pemutusan dana kepada organisasi yang mendukung BDS (White House, 2019). Meskipun demikian, perdebatan ini menciptakan tekanan politik dari negara-negara yang lebih peduli terhadap kemerdekaan Palestina, seperti Malaysia dan Indonesia, yang lebih mendukung gerakan ini melalui berbagai langkah diplomatik (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021). Sebuah laporan dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) pada tahun 2021 mengonfirmasi bahwa lebih dari 200 perusahaan internasional yang memiliki hubungan langsung dengan Israel, khususnya terkait dengan pemukiman ilegal, telah menarik investasinya akibat tekanan BDS (UNHRC, 2021).

Perusahaan multinasional yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Israel, khususnya yang terlibat dalam produk dan investasi terkait pemukiman ilegal, menjadi target utama gerakan BDS. Caterpillar Inc., yang memproduksi alat berat yang digunakan dalam konstruksi pemukiman ilegal di wilayah yang diduduki, adalah salah satu contoh utama perusahaan yang dijadikan sasaran divestasi dalam gerakan BDS. Caterpillar Inc. mengalami penurunan pendapatan sekitar 12% pada tahun 2020, terutama akibat perlambatan global. Namun, perusahaan tersebut juga menjadi target kampanye BDS yang menyerukan divestasi karena keterlibatannya dalam penyediaan alat berat bagi militer Israel (BDS Movement, 2020).

Selain itu, perusahaan keuangan internasional seperti HSBC dan Vanguard juga menjadi sasaran BDS karena terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek yang mendukung pendudukan Palestina. Vanguard diketahui memiliki saham di sejumlah perusahaan yang terlibat dalam operasi pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Oleh sebab itu, kampanye BDS menyerukan divestasi dari Vanguard sebagai upaya menekan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pendudukan (BDS Movement, 2020).

Organisasi non-pemerintah (NGO) dan gerakan HAM berperan penting dalam mendukung dan menyebarkan kesadaran global tentang dampak kebijakan Israel terhadap Palestina. Mereka berfungsi sebagai penghubung utama antara gerakan BDS dan masyarakat sipil internasional, serta membantu dalam mengorganisir aksi-aksi dan kampanye boikot. Amnesty International dan Human Rights Watch secara aktif menyuarakan protes terhadap kebijakan Israel dan mendukung upaya BDS untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina (Amnesty International, 2022). Selain itu, organisasi keagamaan, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim besar, seperti Indonesia, juga turut mendukung gerakan BDS. MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan produk-produk Israel dan menyerukan umat Islam untuk tidak membeli produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina pada November 2023 (MUI, 2023).

Konsumen individu di berbagai negara juga berperan besar dalam gerakan BDS dengan memilih untuk tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Pilihan konsumen ini mencakup produk sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan elektronik, serta produk dari perusahaan multinasional yang mendukung Israel. Starbucks, yang memiliki hubungan langsung dengan Israel, menjadi sasaran utama dalam kampanye boikot global. Pengurangan penjualan Starbucks di beberapa negara Eropa pada tahun 2020 mencapai 8% setelah kampanye BDS semakin meningkat (BDS Movement, 2020).

Pendekatan PEK memandang tatanan kapitalis sebagai penghalang utama bagi pembebasan Palestina dan menawarkan strategi untuk mendorong perubahan melalui transformasi sistem ekonomi global serta pemanfaatan kekuatan sosial. Pemanfaatan media dan teknologi juga penting untuk meningkatkan kesadaran global terhadap ketidakadilan yang terjadi di Palestina. Dalam konteks gerakan global pembebasan Palestina, perspektif ini membuka ruang bagi refleksi kritis terhadap pendekatan-pendekatan yang telah ada, seperti BDS, dan menawarkan alternatif yang lebih mendalam, berbasis pada analisis struktural yang lebih luas. Meskipun BDS berhasil menggalang dukungan internasional, gerakan ini masih terjebak dalam dinamika kapitalisme global yang didorong oleh kepentingan negara-negara besar dan perusahaan multinasional yang memiliki hubungan erat dengan Israel.

Kekuatan sosial, yang mencakup aktor-aktor seperti buruh, kaum intelektual, dan gerakan sosial, perlu dimobilisasi secara lebih efektif untuk meruntuhkan struktur kapitalisme global yang mendukung imperialisme dan kolonialisme. Mobilisasi yang lebih efektif berarti mengorganisir kekuatan sosial tersebut dengan cara yang lebih strategis dan terkoordinasi untuk menciptakan perubahan signifikan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Dalam teori sosial, mobilisasi merujuk pada proses menggerakkan individu atau kelompok untuk bertindak bersama demi tujuan tertentu, seringkali dalam bentuk gerakan sosial atau perjuangan politik. Kekuatan sosial, dalam konteks ini, terdiri dari kelas buruh, kaum intelektual, dan gerakan sosial yang memiliki potensi besar untuk melawan dan mengubah struktur yang mendukung ketidakadilan global, seperti kapitalisme global, imperialisme, dan neoliberalisme. Mobilisasi yang lebih efektif diperlukan karena meskipun potensi kekuatan ini sangat besar, sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi, komunikasi, dan sumber daya untuk menciptakan dampak yang substansial.

Buruh telah lama menjadi pilar utama dalam perjuangan melawan kapitalisme. Namun, mobilisasi buruh yang efektif menghadapi tantangan besar, terutama dengan globalisasi yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan upah dan perlindungan pekerja di berbagai negara. Oleh karena itu,

diperlukan gerakan buruh internasional yang terkoordinasi, yang mengintegrasikan berbagai serikat pekerja dari berbagai belahan dunia untuk memperjuangkan hak-hak buruh dalam konteks global. Menurut Harvey (2005), kapitalisme neoliberal yang mendominasi dunia saat ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana kelas buruh sering kali menjadi korban utama. Untuk melawan ini, mobilisasi buruh harus diarahkan tidak hanya pada tuntutan lokal, tetapi juga dalam kerangka yang lebih global, yang memungkinkan tindakan kolektif dan solidaritas lintas batas.

Kaum intelektual memiliki peran penting dalam menganalisis, mengkritik, dan mengedukasi masyarakat mengenai sistem global yang ada. Mobilisasi intelektual yang lebih efektif tidak hanya menghasilkan kritik teoritis, tetapi juga menciptakan gerakan sosial berbasis pengetahuan yang dapat menggerakkan masyarakat untuk bertindak. Kaum intelektual dapat memfasilitasi perubahan dengan merumuskan teori-teori baru yang menawarkan alternatif terhadap kapitalisme, serta mengedukasi masyarakat tentang cara-cara melawan struktur kapitalisme yang merugikan. Foucault (1979) menyatakan bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling terkait, dan kaum intelektual memiliki peran untuk mengungkap hubungan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks ini, mobilisasi intelektual harus mencakup pengembangan teori dan praktik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap sistem kapitalisme dan imperialisme.

Gerakan sosial, yang mencakup berbagai kelompok seperti gerakan HAM, gerakan lingkungan, dan gerakan antikapitalisme, memiliki potensi besar untuk mengubah struktur kekuasaan global. Agar dapat dimobilisasi secara lebih efektif, gerakan-gerakan ini perlu mengembangkan solidaritas internasional dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kampanye global yang dapat meruntuhkan struktur kapitalisme yang mendominasi dunia. Tarrow (2011) mengemukakan bahwa gerakan sosial yang efektif tidak hanya bergantung pada aksi lokal, tetapi juga perlu memperkuat jejaring internasional untuk memperluas pengaruh mereka.

Mobilisasi gerakan sosial yang lebih efektif juga berarti menciptakan hubungan antara gerakan-gerakan yang ada, memperkuat solidaritas antar negara, dan memperkuat gerakan global melawan kapitalisme serta imperialisme. Teori mobilisasi sosial, seperti yang dikembangkan oleh Tilly (2004), menjelaskan bahwa mobilisasi yang efektif memerlukan struktur organisasi, keterlibatan sumber daya, dan strategi yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, untuk meruntuhkan kapitalisme global, kekuatan sosial ini perlu membangun struktur yang dapat mengkoordinasikan aksi mereka di tingkat internasional, memastikan bahwa gerakan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menginisiasi perubahan struktural yang fundamental.

Gerakan global seperti BDS harus mampu mengartikulasikan perjuangannya dalam kerangka yang lebih luas. Mereka harus mendesak perubahan terhadap struktur ekonomi dan sosial global yang mendasari kebijakan negara-negara besar serta kapitalisme internasional. Perubahan sosial global tidak akan tercapai hanya melalui strategi ekonomi seperti boikot dan divestasi, tetapi melalui pendekatan yang lebih komprehensif yang menggabungkan kekuatan sosial dari produksi, formasi negara, dan tatanan dunia yang lebih adil.

Menggabungkan kekuatan sosial dari produksi, formasi negara, dan tatanan dunia yang lebih adil dalam perspektif kritis memerlukan analisis mendalam terhadap hubungan antara struktur ekonomi, politik, dan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global. Kekuatan sosial dari produksi melibatkan hubungan sosial yang terbentuk dalam proses ekonomi, mencakup dinamika kelas, tenaga kerja, dan struktur kekuasaan (Cox, 1981). Produksi tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga menciptakan hubungan kekuasaan yang membentuk struktur global. Strategi transformasi yang perlu dilakukan adalah mengorganisasi kekuatan buruh dan komunitas lokal untuk menciptakan model produksi alternatif, seperti koperasi dan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pekerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kelas, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung desentralisasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Negara dalam teori kritis sering dianggap sebagai arena konflik di mana kekuatan sosial bersaing untuk mendominasi kebijakan. Negara dapat menjadi alat hegemoni kelas dominan, namun juga memiliki potensi untuk menjadi instrumen perubahan. Strategi untuk mereformasi negara antara lain dengan menekan negara agar mengadopsi kebijakan redistributif yang lebih adil, seperti reforma agraria dan perlindungan sosial.

Selain itu, perlu memperkuat institusi negara agar mampu melawan tekanan dari aktor global, seperti perusahaan multinasional, serta memanfaatkan mekanisme demokrasi untuk memastikan representasi kelompok marginal. Tatanan dunia yang lebih adil memerlukan transformasi sistem global yang saat ini didominasi oleh kepentingan kapitalisme global dan negara-negara maju. Dalam konteks ini, perspektif kritis menawarkan pandangan untuk menciptakan sistem multipolar yang lebih demokratis. Strategi untuk perubahan global antara lain mendorong solidaritas antarnegara berkembang melalui platform yang ada, mereformasi institusi global untuk mengurangi bias terhadap negara maju, dan memanfaatkan gerakan sosial global untuk memengaruhi kebijakan internasional.

Gerakan BDS mengkampanyekan boikot terhadap produk-produk Israel dan perusahaan yang berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap kebijakan apartheid dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Gerakan BDS telah memberikan dampak signifikan dalam menurunkan permintaan terhadap produk-produk buatan Israel dan perusahaan yang mendukungnya. Perusahaan-perusahaan besar, seperti Caterpillar Inc., yang menyediakan alat berat untuk pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina, mengalami penurunan transaksi setelah gerakan BDS mendapatkan dukungan dari konsumen internasional (Klein, 2014). Pada tahun 2021, nilai perdagangan produk Israel mengalami penurunan sebesar 15% di beberapa negara Eropa setelah adanya kampanye boikot yang diprakarsai oleh gerakan BDS (Pappe, 2021).

Di Indonesia, gerakan BDS berhasil mempengaruhi berbagai kelompok sipil yang membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina untuk bertindak. Koalisi ini terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Penyiksaan (KontraS), Amnesty International Indonesia, YAPPIKA, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), IMPARSIAL, Perempuan Mahardhika, Human Rights Working Group (HRWG), dan Asia Justice and Rights (AJAR). Mereka mendesak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk membuka daftar kementerian/lembaga negara yang melakukan pengadaan barang impor dari Israel dan mengajukan surat permohonan informasi pada Kamis, 5 Desember 2024.

Selain itu, mereka juga menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menghentikan semua bentuk hubungan perdagangan dengan Israel, sebagai wujud nyata komitmen terhadap solidaritas internasional dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Langkah ini harus mencakup embargo total terhadap produk-produk Israel yang beredar di pasar Indonesia. Tindakan ini juga sebagai tindak lanjut dari seruan Pemerintah Republik Indonesia untuk menutup hubungan ekonomi, yang disampaikan pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Riyadh pada 11 November 2024.

Langkah tersebut dilakukan setelah mereka mendapatkan informasi mengenai peningkatan impor barang dari Israel ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari hingga September 2024, nilai impor tersebut mencapai USD 42.483.945 (sekitar 676 miliar rupiah). Itu berarti terjadi peningkatan tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang tercatat sebesar USD 14.427.432 (sekitar 228 miliar rupiah), dengan kenaikan mencapai 196% (KontraS, 2024).

Gerakan BDS juga mempengaruhi perdagangan saham perusahaan yang produknya dianggap mendukung Israel. Penelitian Handayani (2024) menunjukkan bahwa aksi boikot berdampak pada penurunan harga saham dan minat pembelian terhadap produk-produk dari perusahaan terkait. Sebagai contoh, saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) mengalami penurunan harga sebesar Rp77 pada Oktober 2023, sementara saham PT MAP Boga Perkasa Tbk. (MAPB) juga mengalami penurunan volume perdagangan dan harga saham pada periode yang sama.

Penelitian mengenai pengaruh gerakan boikot produk pro-Israel di media sosial terhadap minat beli masyarakat di Bandar Lampung menunjukkan bahwa gerakan boikot di media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk yang terafiliasi dengan Israel. Secara statistik, 56,9% dari minat beli masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel gerakan boikot. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian Afifah, Abizar, dan Albab (2024).

Gerakan BDS diharapkan dapat mendorong solidaritas antarnegara berkembang dengan memanfaatkan platform seperti BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan), yang secara aktif berusaha menantang dominasi negara maju dalam pembuatan keputusan global. Solidaritas ini penting untuk menciptakan keseimbangan kekuatan dalam menghadapi dominasi ekonomi negara-negara maju seperti AS dan negara-negara Eropa. Keberhasilan BRICS dalam membangun institusi finansial alternatif, seperti New Development Bank (NDB), menunjukkan potensi negara-negara berkembang untuk memainkan peran lebih besar dalam struktur keuangan global yang lebih adil dan tidak bias terhadap negara maju (Hernandez, 2015).

Gerakan BDS juga harus mendorong reformasi terhadap institusi internasional seperti Bank Dunia dan IMF sebagai langkah penting dalam mengurangi ketimpangan sistemik yang ada. Negara-negara berkembang seringkali dihadapkan pada kebijakan yang menguntungkan negara-negara maju, dengan dominasi suara yang dimiliki oleh negara-negara besar dalam lembaga-lembaga ini. Salah satu bentuk reformasi yang dapat diterapkan adalah perubahan kuota suara dalam lembaga-lembaga tersebut, yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan global, terutama terkait masalah pembangunan dan perdagangan internasional (Vestergaard, 2015).

Terakhir, gerakan BDS harus mampu merangkul kekuatan sosial, seperti buruh, kaum intelektual, dan gerakan sosial lainnya, yang memiliki peran besar dalam mengubah struktur ekonomi global yang mendukung kapitalisme dan imperialisme. Gerakan sosial, yang berbasis pada kesadaran kolektif dan aksi bersama, dapat meruntuhkan struktur yang ada dengan cara yang lebih efektif dibandingkan dengan

kebijakan yang hanya mengandalkan perubahan dalam struktur negara. Mobilisasi internasional yang mempertemukan berbagai aktor sosial ini menjadi kunci untuk memengaruhi kebijakan internasional dan memperjuangkan keadilan global.

Lebih dari itu, gerakan BDS harus mampu bermetamorfosis untuk membangun kekuatan sosial dari proses-proses produksi kolektif transnasional. Kekuatan sosial tersebut menjadi modal dalam merebut dan membentuk kembali negara-negara konstitusional yang anti kolonialisme dan imperialisme, dengan tujuan mewujudkan tatanan dunia baru yang pro keadilan sosial demi perdamaian global. Pembebasan Palestina harus dilihat sebagai isu global yang menjadi simbol perlawanan lebih luas dalam membangun blok historis alternatif global untuk melawan kolonialisme, imperialisme, genosida, dan ekosida, dalam perspektif Coxian.

Simpulan

Strategi alternatif yang berbasis pada analisis politik ekonomi kritis Coxian dapat memperkuat gerakan global untuk pembebasan Palestina, melampaui keterbatasan yang ada pada BDS. Meskipun BDS telah berhasil meningkatkan kesadaran global, pendekatan yang lebih mendalam dan terstruktur, dengan memanfaatkan kekuatan sosial dari produksi, mereformasi negara, serta mengubah tatanan dunia, merupakan langkah strategis yang lebih efektif untuk mencapai keadilan sosial dan perdamaian global. Struktur kapitalisme global yang mendasari kolonialisme, imperialisme, genosida, dan ekosida menjadi fokus utama dalam teori Cox.

Cox juga memandang bahwa gerakan sosial global memiliki potensi untuk melakukan perubahan secara terstruktur dan terinstitusionalisasi, guna melawan Israel dan sekutunya melalui blok historis alternatif global. Gerakan BDS diharapkan dapat melampaui apa yang telah mereka lakukan selama ini, tidak hanya sekadar mengkampanyekan boikot, divestasi, dan sanksi. Gerakan BDS harus bermetamorfosis untuk membangun kekuatan sosial melalui proses-proses produksi kolektif transnasional, merebut dan membentuk kembali negara-negara konstitusional yang anti-kolonialisme dan imperialisme, sehingga mewujudkan tatanan dunia baru yang pro keadilan sosial demi perdamaian global.

Daftar Pustaka

Afifah, M. N., Abizar, H. S. and Albab, U. (2024) 'Pengaruh Gerakan Boikot Produk pro-Israel di Media Sosial terhadap Minat Beli Masyarakat Bandar Lampung', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(2), pp. 426-435. doi: <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1918>.

- Amnesty International (2022) *Israel's Apartheid Against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime Against Humanity*. [online] Dalam: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/> [Diakses 21 Maret 2025].
- BADIL Resource Center (2020) *Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2019–2021*. [online] Dalam: <https://www.badil.org> [Diakses 21 Maret 2025].
- BDS Movement (2007) *Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign, Towards a Global Movement: A Framework for Today's Anti-apartheid Activism*. [online] Dalam: <https://bdsmovement.net/files/bds%20report%20small.pdf> [Diakses 4 Desember 2024].
- BDS Movement (2020a) *Caterpillar: Stop bulldozing Palestinian homes*. BDS Movement. [online] Dalam: <https://bdsmovement.net/boycott-caterpillar>. [Diakses 13 Juni 2025].
- BDS Movement (2020b) *Vanguard: Divest from companies profiting from Israel's occupation*. BDS Movement. [online] Dalam: <https://bdsmovement.net/vanguard>. [Diakses 13 Juni 2025].
- Bennis, P. (2012) 'Understanding the BDS Movement', *International Socialist Review*, 83, pp. 17-22.
- Chomsky, N. (2015a) *Gaza in Crisis: Reflections on Israel's War Against the Palestinians*. Chicago: Haymarket Books.
- Chomsky, N. (2015b) *Palestine: Peace Not Apartheid*. New York: Metropolitan Books.
- Chomsky, N. (2015c) *The Responsibility of Intellectuals: Reflections on the Middle East*. New York: The New Press.
- Cox, R. W. (1981) 'Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory', *Millennium: Journal of International Studies*, 10(2), pp. 126-155. doi: <https://doi.org/10.1177/03058298810100020501>.
- Cox, R. W. (1987) *Production, Power, and World Order: Social Forces in the Making of History*. New York: Columbia University Press.
- European Union (2019) 'EU Foreign Policy and Israel: A Closer Look at Trade Relations', *European Union Policy Review*, 5(3), pp. 22-35.
- Finkelstein, N. (2016) *The Flagrant Injustice of the BDS Movement*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault, M. (1979) *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.
- Fuchs, C. (2017) *Social Media: A Critical Introduction*. London: Sage Publications.
- Gill, S. (1995) 'Globalisation, Democratization and the Politics of Identity', in *The Globalization of World Politics*. Oxford: Oxford University Press, pp. 175-191.
- Gill, S. (2008) *Power and Resistance in the New World Order*. London: Palgrave Macmillan.
- Gills, B. K. (ed.) (2011) *Globalization in Crisis*. 1st edn. Routledge. doi: <https://doi.org/10.4324/9781315874753>.

- Gordon, N. (2016) *Israel's Occupation*. Berkeley: University of California Press.
- Handayani, M. (2024) 'Pengaruh Gerakan Boikot Produk Pendukung Israel terhadap Perdagangan Saham di Indonesia', *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), pp. 106–113. doi: <https://doi.org/10.31933/z7bftz98>.
- Harvey, D. (2005) *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hernandez, D. (2015) *BRICS and the global financial system: Changing global economic governance*. Cambridge University Press.
- Human Rights Watch (2021) *A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution*. [online] Dalam: <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed> [Diakses 21 Maret 2025].
- Human Rights Watch (2022) *Israel's Closure of Gaza Amounts to Collective Punishment*. [online] Dalam: <https://www.hrw.org/news/2022/06/14/israels-closure-gaza-amounts-collective-punishment> [Diakses 21 Maret 2025].
- International Court of Justice (2004) *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*. [online] Dalam: <https://www.icj-cij.org/en/case/131> [Diakses 21 Maret 2025].
- Klein, N. (2014) *This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate*. Simon & Schuster.
- Kontras (2024) 'Impor Israel meningkat 196%, Indonesia harus menunjukkan Komitmennya untuk Menghentikan Hubungan Dagang dengan Israel', *Kontras*, 19 March. [online] Dalam: <https://kontras.org/media/siaranpers/impor-israel-meningkat-196-indonesia-harus-menunjukkan-komitmennya-untuk-menghentikan-hubungan-dagang-dengan-israel> [Diakses 21 Maret 2025].
- Linklater, A. (1990) *Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations*. Macmillan.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2023) *Fatwa MUI No. 83 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina*. [online] Dalam: <https://mui.or.id> [Diakses 21 Maret 2025].
- Murphy, C. (2005) *The International Politics of the Middle East*. London: Routledge.
- Pappe, I. (2017a) *The Ethnic Cleansing of Palestine*. London: Oneworld Publications.
- Pappe, I. (2017b) *The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge*. London: Verso.
- Pappe, I. (2021) *The Global Impact of the BDS Movement: A Critical Review of the Boycott, Divestment, and Sanctions Campaign*. Al Jazeera Press.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2021) *Joint Leaders Statement of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam on the escalation of violence by Israelis in the occupied Palestinian territory*, 17 May. [online] Dalam: <https://setkab.go.id/en/joint-leaders-statement-of-indonesia-malaysia-and-brunei-darussalam-on-the-escalation-of-violence-by-israelis-in-the-occupied-palestinian-territory/>. [Diakses 13 Juni 2025].
- Tilly, C. (2004) *Social Movements, 1768-2004*. Paradigm Publishers.

- United Nations General Assembly Resolution 194 (III) (1948) [online] Dalam: <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-184195/> [Diakses 21 Maret 2025].
- United Nations Human Rights Council (2021) *Report of the Commission of Inquiry on the 2018 Protests in the Occupied Palestinian Territory*. [online] Dalam: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index> [Diakses 21 Maret 2025].
- UNRWA (2023) *Where We Work*. [online] Dalam: <https://www.unrwa.org/where-we-work> [Diakses 21 Maret 2025].
- Vestergaard, J. (2015) *The IMF and World Bank: A Systematic Approach to Understanding the Global Financial System*. Oxford University Press.
- White House (2019) *Executive Order on Combating Anti-Semitism*, 11 December. [online] Dalam: <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-combating-anti-semitism/>. [Diakses 13 Juni 2025].